

# Implementasi Pengendalian Intern Standar Sarbanes-Oxley Act (SOA) Pada Perusahaan Telekomunikasi

Dodi Herviyana Saputra  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
Email : raden57958@gmail.com

## Abstract

*The Sarbanes-Oxley Act (SOA) was issued to protect the interests of investors by creating good corporate governance and accountability within the company. SOA, especially sections 302 and 404, require an annual management report regarding the company's internal control over financial reporting and the management report is the subject to be audited. This study describes the implementation of SOA at PT Telkom, Tbk, because PT Telkom, Tbk is one of the Indonesian companies listed on the stock exchange in the United States (NYSE) so that PT Telkom must comply with SOA as required by the SEC. The research was conducted by comparing SOA theory or standards with SOA practices that occurred at PT Telkom, Tbk. The results of the research show that PT Telkom has implemented SOA provisions. And from the results of research conducted in the Finance Section of PT. Telkom Yogyakarta shows that increased transparency and regulation of the audit industry that encourages the effectiveness and independence of auditors is needed to maintain and increase investor confidence in the capital market. SOA Implementation at PT. Telkom, especially concerning section 302 (Corporate responsibility for financial reports) and section 404 (Management assessment of internal controls) is expected to provide benefits to the company in realizing Good Corporate Governance (GCG). With Good Corporate Governance, the transparency of PT. Telkom as a public company will be even more real.*

*Key Word : Sarbanes-Oxley Act, Internal Control, Good Corporate Governance*

## Abstrak

Sarbanes-Oxley Act (SOA) diterbitkan untuk memproteksi kepentingan investor dengan cara menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), dan akuntabilitas dalam perusahaan. SOA khususnya section 302 dan 404 mensyaratkan adanya laporan manajemen tahunan (annual management report) tentang pengendalian intern perusahaan atas laporan keuangan dan laporan manajemen tersebut merupakan subjek yang akan diaudit. Penelitian ini memaparkan implementasi SOA pada PT Telkom, Tbk, karena PT Telkom, Tbk salah satu perusahaan Indonesia yang listing di bursa efek di Amerika Serikat (NYSE) sehingga PT Telkom harus patuh terhadap SOA seperti yang disyaratkan oleh SEC. Penelitian dilakukan dengan membandingkan teori atau standar SOA dengan praktik SOA yang terjadi di PT Telkom, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Telkom sudah melaksanakan ketentuan SOA. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan di Bagian Keuangan PT. Telkom Yogyakarta menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan pengaturan industri audit yang mendorong efektivitas dan independensi auditor sangat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Implementasi SOA di PT. Telkom, terutama menyangkut section 302 (Corporate responsibility for financial reports) dan section 404 (Management assessment of internal controls) diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam mewujudkan Good, Governance Corporate (GCG). Dengan Good, Governance Corporate ini maka transparansi PT. Telkom sebagai perusahaan publik akan semakin nyata.

Kata Kunci : Sarbanes-Oxley Act, Pengendalian Intern, Good Corporate Governance

## 1. Latar Belakang

Dalam era global, persaingan pada dunia bisnis menjadi semakin ketat. Perusahaan – perusahaan yang pada masa lalu hanya bersaing pada tingkat regional dan nasional, pada masa sekarang harus menghadapi persaingan global. Untuk memenangkan persaingan global perusahaan harus mempunyai strategi dan selalu mengadakan perubahan – perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan dengan maksud mengimbangi kemajuan zaman yang begitu cepat. Ada beberapa cara yang dilakukan kebanyakan perusahaan untuk memasuki persaingan global yang diantaranya adalah mengubah strategi, meningkatkan pelayanan agar lebih fokus kepada pelanggan, menerapkan berbagai sistem mutu dalam

mencapai *performance excellence*, dan selalu mengevaluasi ketepatan informasi laporan keuangan perusahaan untuk menarik

kepercayaan masyarakat dunia bisnis terhadap kinerja perusahaan tersebut.

Keandalan dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kepercayaan dari investor di pasar modal. Perekonomian suatu negara yang menganut sistem pasar, terutama yang memiliki pasar modal untuk menggalang dana masyarakat bagi kebutuhan investasi perusahaan emiten, sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal tersebut. Kepercayaan pemegang saham terhadap manajemen suatu perusahaan dapat meningkat apabila informasi keuangan dan informasi

penting lainnya dapat mereka peroleh secara transparan dan ketepatan serta kebenarannya diatestasi oleh kantor akuntan publik yang kompeten, efektif, dan independen.

Beberapa peristiwa negatif baik di Indonesia dan di negara maju menunjukkan bahwa tingkat keandalan dan ketepatan

Indonesia saat ini tengah menghadapi perubahan yang sangat drastis. Pada tahun 1995, PT. Telkom telah menjajaki dunia internasional dengan *listing* di *New York Stock Exchange* (NYSE), *London Stock Exchange*, serta opsi perdagangan tanpa pencatatan (*Public Offering Without Listing*) di *Tokyo Stock Exchange*. Tindakan ini mempunyai konsekuensi khusus, yaitu PT. Telkom harus mentaati semua peraturan pasar modal yang ada di negara *super power* (Amerika Serikat). Salah satu peraturan yang harus

ditaati PT. Telkom sebagai perusahaan yang terdaftar pada NYSE adalah penerapan Sarbanes Oxley Act, terutama implementasi pada *section 302* (informasi laporan keuangan masih belum seperti yang diharapkan. Banyak kasus terjadi di pasar modal yang membuat investor tidak dapat sepenuhnya mempercayai begitu saja laporan yang dibuat emiten, walaupun laporan keuangan tersebut sudah melalui proses audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik membuat masyarakat bertanya mengenai kemampuan dan keandalan dari kantor – kantor akuntan yang terlibat.

Skandal jatuhnya perusahaan besar seperti Enron dan Worldcom di bursa saham Amerika Serikat (AS) tahun 2002, yang disebabkan karena salah urus dan manipulasi (*fraud*) laporan keuangan yang mengakibatkan rusaknya kepercayaan publik dan investor khususnya di AS merupakan salah satu dari sekian banyak contoh adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan perusahaan. Upaya mengembalikan kepercayaan pasar, dikeluarkanlah regulasi Sarbanes-Oxley Act (2002) oleh US Securities and Exchange Commission (SEC) yang memuat ketentuan baru untuk memperkuat governance dan struktur akuntabilitas perusahaan publik. Kongres Amerika Serikat dengan penggagas utamanya senator Paul Sarbanes dan wakil rakyat Michael Oxley mengeluarkan Undang – undang *The Sarbanes – Oxley Act* atau SOA dan telah ditandatangani oleh Presiden Bush pada tanggal 30 Juli 2002 (Ronny Kusuma Muntoro, 2006). Sarbanes Oxley Act merupakan sebuah produk hukum yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi dan keterbukaan informasi, termasuk tata cara pengelolaan data di perusahaan publik.

Beberapa penelitian mengakui pentingnya penelitian hubungan antara kualitas audit dengan peran pengendalian intern berbasis Sarbanes Oxley Act dan keandalan pelaporan keuangan. Lennox (1999), menyatakan bahwa perusahaan audit yang besar lebih mampu menangkap sinyal akan penyelewengan keuangan yang terjadi dan mengungkap dalam

opini audit. Murdijaningsih (2014) menyatakan bahwa untuk mengatasi kecurangan laporan keuangan perusahaan melakukan sebuah Tata kelola keuangan yang baik berbasis sarbanes oxley act dengan diterbitkannya keputusan direksi mengenai anti fraud apabila terjadi fraud. Untuk membuat tata kelola keuangan yang baik berdasarkan sarbanes oxley act, perusahaan menerapkan Sarbanes Oxley act terutama Seksi 404 yang mensyaratkan manajemen perusahaan untuk bertanggung jawab atas pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan yang memadai, agar dapat memberikan jaminan yang cukup terkait dengan keandalan pelaporan keuangan.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk atau lebih dikenal dengan nama PT. Telkom sebagai salah satu perusahaan BUMN terbesar di *Corporate responsibility for financial reports*) dan *section 404 (Management assessment of internal controls)*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana persiapan implementasi pengendalian intern standar SOA pada bagian Keuangan PT. Telkom Yogyakarta ?
2. Apa saja langkah yang dilakukan dalam mempersiapkan implementasi pengendalian intern standar SOA di bagian Keuangan PT. Telkom Yogyakarta ?

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Sebagai sarana improvisasi diri ditengah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang audit khususnya mengenai implementasi pengendalian intern dengan standar Sarbanes-Oxley Act (SOA).
2. Memberikan pemahaman bagi manajemen perusahaan terhadap implementasi pengendalian intern standar Sarbanes-Oxley Act (SOA) dalam rangka menciptakan keandalan pelaporan keuangan.

## Kajian Pustaka

### Definisi Pengendalian Intern

AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) memberi definisi atas pengendalian intern sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode, dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang diterapkan.” (Bambang Hartadi, 1987 : 121)

Pengendalian intern digunakan oleh suatu entitas sebagai faktor penentu keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Oleh karena itu, auditor (sebelum melakukan audit) harus mengetahui secara mendalam atas informasi keuangan, standar pekerjaan lapangan, dan

memahami pengendalian intern yang diterapkan entitas. Standar pekerjaan lapangan yang kedua berbunyi sebagai berikut:

“Pemahaman yang memadai terhadap struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, dan lingkup pengujian yang dilaksanakan.”(Munawir HS,1995 : 227)

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personal lain entitas untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan utama (Al. Haryono Yusuf,2001 : 252), yaitu:

- a. Keandalan pelaporan keuangan
- b. Efektivitas dan efisiensi operasi
- c. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

#### **Tujuan Pengendalian Intern**

Tujuan Pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan utama (Al.Haryono Yusuf, 2001 : 253), yaitu:

- d.Keandalan pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disiapkan sesuai dengan standar pelaporan, misalnya prinsip akuntansi berlaku umum.

- e. Efektifitas dan efisiensi operasi.

Pengendalian dalam sebuah organisasi adalah alat untuk mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha, dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi adalah pengamanan aktiva dan catatan aktiva fisik entitas yang dapat dicuri, disalahgunakan, atau rusak jika tidak dilindungi oleh Pengendalian intern yang memadai.

- f. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku

Entitas terikat dengan banyak hukum dan peraturan. Beberapa diantaranya tidak terkait langsung dengan akuntansi, misalnya UU lingkungan hidup dan UU perburuhan. Peraturan lain yang terkait erat dengan akuntansi antara lain UU perpajakan dan UU perseroan terbatas.

#### **Unsur – unsur Pengendalian Intern**

Laporan COSO menyatakan adanya lima unsur sistem pengendalian intern yang saling berkaitan (Al. Haryono Yusuf, 2001 : 257), yaitu :

- g. Lingkungan pengendalian (*Control*

*environment*)

Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang – orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, untuk membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu entitas, (Mulyadi, 2001 : 172-176 )

- h. Penaksiran resiko

Penaksiran resiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Penaksiran resiko manajemen untuk keperluan pelaporan keuangan adalah penaksiran resiko yang terkandung dalam asersi tertentu dalam laporan keuangan dan desain implementasi aktivitas tujuan pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi resiko tersebut pada tingkat minimum , dengan mempertimbangkan biaya manfaat.

- i. Informasi dan komunikasi

Sistem akuntansi dibuat untuk mengidentifikasi, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan hutang entitas. Transaksi terdiri atas pertukaran aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi yaitu transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan.

- j. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok.

- k. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas pengendalian intern. Pengendalian intern yang berlaku di suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Secara umum, auditor perlu memperoleh pemahaman tentang pengendalian intern kliennya untuk perencanaan audit. Oleh karena itu, auditor sangat menaruh kepercayaan atas efektivitas pengendalian intern dalam mencegah terjadinya kesalahan material (nomerik) dalam proses akuntansi.

#### **Pemahaman terhadap Pengendalian Intern**

Standar pengauditan kedua mewajibkan auditor mengumpulkan informasi tentang pengendalian intern dan menggunakan informasi tersebut

sebagai acuan perencanaan audit (Munawir HS,1995 : 236). Dalam memperoleh pemahaman atas struktur pengendalian intern, auditor menggunakan tiga prosedur audit dalam memperoleh pemahaman atas pengendalian intern, yaitu:

- l. Mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan unsur pengendalian.
- m. Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan.
- n. Melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Informasi yang terkumpul digunakan untuk menentukan:
  - a. Rancangan berbagai kebijakan dan prosedur dalam tiap-tiap unsur pengendalian.
  - b. Apakah kebijakan dan prosedur tersebut benar-benar dilaksanakan.

Auditor mendokumentasikan informasi mengenai pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

- a. Kuesioner pengendalian baku (*standard internal control questionnaire*). Auditor harus mengetahui sistem akuntansi dalam aktivitas entitas. Auditor juga harus memahami unsur pengendalian intern yang seharusnya ada dalam sistem akuntansi entitas.
- b. Uraian tertulis (*written description*). Informasi tentang pengendalian dapat dikumpulkan dengan cara membuat siklus bisnis (alur transaksi), catatan yang diselenggarakan (dokumentasi), dan pertanggung jawaban dalam perusahaan.
- c. Bagan alir sistem (*system flowchart*). Cara ini menggunakan gambar atau simbol tertentu. Penggunaan cara ini memungkinkan auditor melakukan penilaian secara tepat mengenai efektivitas pengendalian intern.

### **Sarbanes-Oxley Act (SOA)**

*Sarbanes-Oxley Act* adalah Undang – undang yang diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George Walker Bush pada tanggal 30 Juli 2002 (Hendar Sukandar, 2005 : 3). Undang – undang ini dikeluarkan sebagai respon dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti : *World Com* (MCI), *AOL TimeWarner*, *Aura Systems*, *Citigroup*, *Computer Associates International*, *CMS Energy*, *Global Crossing*, *HealthSouth* ; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “*the big five*” seperti : Arthur Andersen, KPMG, dan PWC. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders* dan para pegawai. Dengan diterbitkannya undang – undang ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dari skandal – skandal yang terjadi pada perusahaan

– perusahaan raksasa dunia.

Diterbitkannya undang – undang SOA ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan pasar modal dari *Securities Exchange Commission* (SEC), diharapkan dapat memberi dampak positif diantaranya :

- o. Meningkatkan standar akuntabilitas korporasi.
- p. Transparansi dalam pelaporan keuangan.
- q. Memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*.
- r. Membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap *corporate governance*.

Secara garis besar, undang – undang SOA terdiri dari 11 *title* dengan beberapa *section* didalamnya. Dalam SOA diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, pengendalian intern, kode etik bagi pejabat dibidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen.

## **2. Metode Penelitian**

### **Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan dan terlibat langsung terhadap aktivitas objek yang diteliti, yakni bagian Keuangan PT. Telkom Yogyakarta sehingga data yang diperoleh menunjukkan keadaan atau realita yang sebenarnya.

#### **2. Studi Pustaka**

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data – data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan informasi yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan *Sarbanes-Oxley Act* dan pengendalian intern. Studi dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur dari sejumlah buku, buletin, kumpulan karya tulis, jurnal dan sumber data lain sebagai penunjang penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, artinya data diperoleh melalui penelitian kemudian dilaporkan apa adanya dan dianalisis secara deskriptif untuk mendapat gambaran mengenai fakta yang ada.

### **Analisis Dan Pembahasan**

Sebagai salah satu perusahaan yang mencatatkan sahamnya di NYSE, PT. Telkom diwajibkan mematuhi peraturan otoritas pasar modal Amerika Serikat yang salah satunya adalah *Sarbanes-Oxley Act* (SOA). Dengan diimplementasikannya aturan SOA ini, diharapkan

dapat menambah dan melengkapi sistem yang telah ada yakni *Malcolm Balridge*, ISO 9001 : 2000, dan CIQS yang kesemuanya

diintegrasikan dalam TQMS ( *Telkom Quality Management System* ).

Peraturan SOA terdiri dari aturan untuk Badan Pengawas Akuntansi perusahaan publik, independensi auditor, pertanggungjawaban perusahaan (*corporate responsibility*), peningkatan *disclosure financial*, *analisis conflict of interest*, wewenang komisi, *studies and reports*, akuntabilitas perusahaan dan kecurangan keuangan, peningkatan hukuman kejahatan kerah putih, pajak pendapatan perusahaan serta *corporate fraud* dan akuntabilitasnya. Hal – hal pokok ini tertuang dalam peraturan sebagai berikut :

1. *Section 101* : Membentuk suatu *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) yang anggotanya independent dan ditunjuk oleh *Securities Exchange Commission* (SEC).
2. *Section 201* : Melarang Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sedang melakukan audit melaksanakan juga pelayanan non-audit pada klien yang sama.
3. *Section 203* : Adanya kewajiban rotasi bagi KAP maupun *Partner in-charge* dari KAP (dibatasi lima tahun) dalam melakukan audit bagi klien yang sama.
4. *Section 204* : Auditor harus melapor kepada Komite Audit (KA) dan tidak sajakepada manajemen.
5. *Section 301* : Komite Audit harus terdiri dari anggota independent dan bertanggung jawab untuk penunjukan dan penyupervisian auditor.
6. *Section 302* : Mensyaratkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan memberikan sertifikasi mengenai kebenaran laporan keuangan yang didukung oleh efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.
7. *Section 401* : Pengungkapan secara lengkap hal – hal lepas neraca (*off balance sheet*) yang material. Dan hal ini harus dinyatakan secara eksplisit dalam “diskusi dan analisis manajemen”.
8. *Section 404* : Laporan keuangan tahunan harus menyertakan pernyataan mengenai tanggung jawab manajemen atas pengendalian intern dan asesmen manajemen terhadap kondisi pengendalian intern yang ada di perusahaan.

Aturan – aturan yang ada dalam undang – undang SOA tidak semua berkaitan langsung dengan PT. Telkom, bagian yang memiliki keterkaitan langsung dengan manajemen PT. Telkom adalah *Section 302* dan *Section 404*. SOA *Section 302* mensyaratkan Direktur Utama dan Direktur Keuangan memberikan sertifikasi mengenai kebenaran laporan keuangan yang didukung oleh efektivitas pelaksanaan pengendalian intern. Sedangkan SOA *Section 404* mewajibkan perusahaan yang mencatatkan sahamnya di bursa saham NYSE untuk mendokumentasikan , mengevaluasi dan melaporkan hasil evaluasi atas efektivitas

pengendalian intern yang dilakukan oleh auditor eksternal dalam opini kewajaran penyajian laporan keuangan. SEC mewajibkan manajemen perusahaan, terutama Direktur Keuangan untuk mencantumkan di dalam laporan keuangan tahunan, pernyataan tertulis atas efektivitas pengendalian intern perusahaan dalam rangka pelaporan keuangan.

Komitmen yang dilakukan oleh manajemen PT. Telkom dalam rangka implementasi SOA 302 dan 404 adalah dengan mengeluarkan Keputusan Direksi (KD).49/2004 mengenai SOA

302 dan 404. Membentuk ”Proyek integrasi *Internal Control*” berdasarkan KD.53/2004. Membentuk ”*Disclosure Committee*” berdasarkan KD.35/2005. Selain itu juga menetapkan tugas dan tanggung jawab masing – masing fungsi yang terkait dengan perancangan, pelaksanaan dan pengelolaan pengendalian intern perusahaan.

### **Implementasi SOA Section 302**

Sertifikasi Direktur Utama dan Direktur Keuangan perusahaan dalam Laporan Keuangan Tahunan yang ditujukan kepada SEC berisikan pernyataan bahwa :

- a. Direktur Utama dan Direktur Keuangan telah mereview Laporan Tahunan yang akan dilaporkan.
- b. Laporan tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar atau menghilangkan informasi atau fakta material yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan.
- c. Informasi keuangan dan non-keuangan yang wajib diungkapkan di dalam Laporan Tahunan tersebut telah bebas dari salah saji material sesuai dengan kondisi operasi dan keuangan perusahaan.
- d. Bertanggung jawab atas pembentukan, pemeliharaan pengendalian dan prosedur pengungkapan (*disclosure controls and procedures*).

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan, telah disampaikan kepada manajemen yang terkait di perusahaan, mengenai :

- 1). Semua kekurangan yang signifikan (*significant deficiencies*) dan kelemahan material (*material weaknesses*) dalam rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal dalam rangka pelaporan keuangan yang berpotensi untuk berpengaruh negatif terhadap kemampuan perusahaan dalam mencatat, memproses, merangkul, dan melaporkan informasi keuangan.
- 2). Semua kecurangan baik yang material maupun tidak, yang melibatkan manajemen atau pegawai perusahaan yang terkait dengan pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan. Pengendalian dan prosedur pengungkapan (*Disclosure Controls and Procedures*) adalah pengendalian dan prosedur yang

dirancang dan dijalankan untuk memberikan keyakinan bahwasemua informasi keuangan dan non-keuangan yang wajib diungkapkan dalam laporan Perusahaan yang disampaikan atau diserahkan ke Lembaga Pasar Modal (*stock exchange*) telah dikumpulkan, diperiksa, dicatat, diproses, diikhtisarkan dan disampaikan secara tepat waktu, akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan di dalam peraturan Lembaga Pasar Modal.

**Implementasi SOA Section 404.**

Laporan yang dilaporkan manajemen perusahaan atas pengendalian intern meliputi hal

- hal sebagai berikut :

- e. Pernyataan bahwa pelaksanaan dan pemeliharaan pengendalian intern perusahaan dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai adalah tanggung jawab manajemen perusahaan;
- f. Menyatakan kesimpulan manajemen mengenai efektivitas pengendalian intern perusahaan dan prosedur pelaporan keuangan berdasarkan pengujian dan evaluasi manajemen terhadap pengendalian keuangan dan prosedur pelaporan keuangan; dan
- g. Pernyataan bahwa auditor independen perusahaan telah melakukan pengujian dan membuat laporan hasil pengujian atas evaluasi manajemen terhadap pengendalian intern perusahaan dan prosedur pelaporan keuangan.

Langkah yang telah dilaksanakan Telkom terkait dengan implementasi SOA Section 404 antara lain dengan melakukan penilaian pengendalian intern di tingkat entitas. Mengidentifikasi bisnis proses yang menjadi tanggung jawab unit kerja terdiri dari 8 siklus bisnis yang meliputi ; Siklus Pendapatan, Siklus Beban, Siklus Perpajakan, Siklus *Treasury*, Siklus Persediaan, Siklus Pelaporan, Siklus *Inventory*, dan Siklus Investasi.

Adapun *flow chart* yang diterapkan pada bisnis proses meliputi :

- a. Judul : Pada bagian judul ini diterangkan nama siklus bisnis, sub siklus bisnis, proses bisnis, sub proses bisnis dan nama serta versi dokumen.
- b. Unit Organisasi : Pada bagian ini menjelaskan unit organisasi yang melakukan aktifitas atau proses bisnis.
- c. Proses Aktifitas : Proses aktivitas mencakup *initiation, recording* dan *authorization, processing* dan *reporting*.
- d. Aktifitas : Aktifitas yang terjadi dapat berupa aktifitas manual yang dikerjakan oleh petugas dan aktifitas aplikasi yang secara otomatis telah dilakukan oleh system.
- e. Dokumen.
- f. Resiko.

- g. Penghubung (*Intersection*)
- h. Pengendalian (*Control*).

Dokumentasi	Implement	Penyerahan
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi <i>accounts</i> dan proses terkait</li> <li>➤ Dokumentasi bisnis dan sub proses</li> <li>➤ Identifikasi risiko-risiko terkait dengan proses</li> <li>➤ Mendesain pengendalian untuk mengurangi risiko</li> </ul> <p><b>Target Penyelesaian 31 Juli 2004</b></p>	<p>proses dan sub proses dengan pengendalian-pengendalian terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Memonitor implementasi</li> <li>➤ Mengevaluasi dan menilai efektivitas implementasi pengendalian</li> </ul> <p><b>Target Penyelesaian 30 November 2004</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sertifikasi efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan</li> <li>➤ Executive Management mengarsipkan Form 20-F kepada US SEC</li> </ul> <p><b>Target Penyampaian 31 Desember 2005</b></p>
<p><b>Dry run Audit dilaksanakan pada Desember</b></p>		

Sumber : Arsip Bagian Keuangan PT. TELKOM Kandatel Yogyakarta, 2005

Selain mengidentifikasi bisnis proses, langkah yang dilakukan juga mengidentifikasi resiko – resiko (Finansial dan Operasional) dan merancang pengendalian intern yang memadai untuk meminimalisir resiko – resikonya pada masing – masing proses bisnis.

**Keterkaitan SOA Section 302 dan Section 404**

Aturan SOA yang terdapat pada section 302 dan section 404 pada dasarnya memiliki beberapa keterkaitan satu sama lain sehingga kedua aturan ini diterapkan dalam manajemen mutu PT. Telkom. Keterkaitan tersebut antara lain :

- h. “Pengendalian dan prosedur pengungkapan” diterapkan pada semua informasi keuangan dan non-keuangan yang material yang wajib diungkapkan di dalam laporan yang akan disampaikan kepada pihak luar, sehingga pihak luar tersebut, khususnya para investor, mengetahuinya secara pasti (SEC).
- i. Secara umum terdapat bagian yang sama antara pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan (*Section 404*) dengan pengendalian dan prosedur pengungkapan (*Section 302*) dimana beberapa komponen dari pengendalian intern dalam rangka pelaporan keuangan menjadi komponen dari kelengkapan sertifikasi pengendalian dan prosedur pengungkapan.
- j. Hasil penilaian pengendalian intern dalam

rangka pelaporan keuangan yang dilakukan oleh personil terkait perusahaan dengan mekanisme *Control Self Assessment* dan *Internal Audit Group* (IAG) melalui audit pengendalian intern perusahaan (sebagaimana dimaksud dalam *Section* 404), akan meningkatkan kualitas dari proses sertifikasi *Section* 302.

### Klasifikasi dan Perhitungan Kontrol

Kontrol untuk KM (Kontrak Manajemen) dihitung berdasarkan unit bisnis, dan tidak dikalikan dengan sub unit bisnis yang ada dibawahnya. Untuk sub unit bisnis, *breakdown* dan supervisi diserahkan kepada masing – masing unit bisnis. Pada saat pelaporan, kontrol diakui “efektif” dilaksanakan hanya jika kontrol tersebut efektif dilaksanakan di keseluruhan sub unit bisnis. Jika ada satu saja sub unit bisnis yang tidak melaksanakan kontrol, maka unit bisnis tidak bisa mengakuinya sebagai “efektif” dilaksanakan.

#### k. Penjelasan Klasifikasi Kontrol

Klasifikasi kontrol yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1). Penetapan Kontrol dalam KM  
Adalah jumlah kontrol yang ditetapkan menjadi tanggung jawab unit terkait dalam Kontrak Manajemen.
- 2). Yang menjadi tanggung jawab unit terkait  
Adalah kontrol - kontrol yang memang ada pada unit terkait, yang terdiri dari :
  - (a).Dijalankan  
Adalah bagian dari kontrol yang menjadi tanggung jawab unit terkait yang sudah dijalankan secara efektif, sesuai dengan yang ada pada *risk control matrix* / *flowchart* di masing-masing siklus bisnis.
  - (b).Belum dijalankan  
Adalah bagian dari kontrol yang menjadi tanggung jawab unit , tetapi belum dijalankan, padahal transaksi / kegiatan tersebut sudah terjadi. (misal: karena ketidaktahuan, lupa, keterbatasan pelaksana sehingga unit terkait belum mampu untuk melaksanakannya).
  - (c).*Process To be*  
Adalah kontrol yang menjadi tanggung jawab unit terkait dalam rangka mengantisipasi kebijakan yang akan diimplementasikan.  
Contoh : bisnis proses pemilahan pendapatan Divre dan ESC yang menggunakan *e-matrix*.
  - (d).Terjadi secara periodik  
Adalah bagian dari kontrol yang menjadi tanggung jawab unit terkait, akan tetapi aktivitas proses bisnisnya terjadi hanya secara periodik. Contoh: aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan anggaran biasanya terjadi pada bulan Juli, sehingga pada KM triwulan I unit yang bersangkutan dengan kontrol tersebut dapat digolongkan dalam kelompok ”terjadi secara periodik”

(e).Transaksi insidental

Adalah bagian dari *control* yang berpotensi untuk terjadi yang menjadi tanggung jawab unit yang bersangkutan.

Contoh : - pembentukan panitia pengadaan (bila diperlukan) - *reprogramming* / RRA (bila diperlukan).

#### I. Contoh Perhitungan

- A. Penetapan Kontrol dalam KM
- B. Yang menjadi tanggung jawab unit terkait

:

- a. Dijalankan
- b. Belum dijalankan
- c. *Process To be*
- d. Terjadi secara periodik
- e. Transaksi insidental

C. Realisasi kontrol yang dianggap jalan :

$$= A - B$$

$$= 170 - 130$$

$$= 40$$

D. Realisasi kontrol yang dianggap dijalankan :

$$= a + c + d + e + C$$

$$= 70 + 5 + 15 + 10 + 40$$

$$= 140$$

Sehingga kinerja (*performansi*) unit terkait dihitung sebesar :

$$D = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times \text{prosentase target KMA}$$

$$= \frac{140}{85} \times 50\% \times 170$$

$$= 164,7\%$$

Prosentase Target Kontrak Manajemen yang ditetapkan : Untuk Triwulan I / 05. 50 % Untuk Triwulan II / 05.

#### Analisis Perhitungan Kontrol

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas, diperoleh pencapaian kinerja Triwulan I/ 2005 sebesar 164,7 %. Ini berarti hasil pencapaian kinerja Triwulan I telah melebihi hasil yang ditargetkan di dalam KM, karena jumlah realisasi kontrol yang dianggap dijalankan sebesar 140 (D) lebih besar daripada target dalam Kontrak Manajemen sebesar 85 yang dihitung dari penetapan kontrol dalam KM (170) dikalikan prosentase target KM untuk Triwulan I sebesar 50 persen.

#### 2. Evaluasi Implementasi SOA di PT.Telkom Yogyakarta

Menurut rencana awal, setelah diselenggarakannya sosialisasi SOA hasil remediasi yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2005, diharapkan pada bulan berikutnya akan dilakukan pengujian implementasi SOA di PT. Telkom Yogyakarta oleh tim IAG Divre IV. Akan tetapi realisasinya, karena berbagai hal yang dihadapi rencana tersebut diundur pada bulan November 2005.

Berikut ini beberapa analisis seputar implementasi pengendalian intern standar SOA di PT. Telkom Yogyakarta :

1. Struktur organisasi dan proses bisnis yang ada saat ini belum sesuai dengan standar dan keseragaman, hal ini mengandung konsekuensi *risk and control assessment* di setiap unit berbeda, sehingga membuat banyaknya jumlah kontrol yang harus dilakukan PT. Telkom. Hal ini terbukti ketika dilaksanakannya remediasi SOA, aturan – aturan yang ada pada SOA tidak dapat dilaksanakan langsung tetapi masih perlu dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi unit kerja masing – masing.
2. Terdapat wacana di kalangan karyawan bahwa dengan implementasi SOA membuat proses bisnis menjadi “*complicated*” tidak simple lagi, rumit dan detail sehingga menuntut disiplin di segala lini. Mulai dari pencatatan transaksi, aliran – aliran uang, monitoring, analisis validitas dan berbagai *cek list* lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. SOA menyimpan sejumlah persyaratan yang berat dan tidak main – main, tidak seperti persyaratan dalam ISO-9001 : 2002 yang jika mendapatkan temuan ‘Major’ ganjarannya adalah pencabutan logo sertifikasi ISO-9001 : 2002 di perusahaan. Sementara di SOA, apabila ada satu temuan saja yang ‘Major’ akibatnya sangat fatal. Tidak hanya sanksi – sanksi administratif yang bisa berdampak buruk terhadap harga saham perusahaan, namun bila temuan itu terpaut dengan kesalahan fatal di bidang keuangan dan bisa dibuktikan, maka ada kemungkinan sanksi berat lainnya yakni dikenakan denda hingga miliaran rupiah. Kondisi ini sungguh membutuhkan disiplin keras disemua lini dalam perusahaan.

Beberapa proses bisnis baru dirasa kurang efisien dan membuat proses menjadi lama. Sebagai contoh sebelum dilaksanakan aturan SOA tugas dalam meng-Entry dan *posting* dokumen Tel-21 dilakukan secara langsung, sementara setelah di-implementasikannya SOA terjadi pemisahan tugas dalam meng-Entry dan *posting* dokumen Tel-21 sehingga membuat waktu kerja kurang efisien.

3. Sangat minimnya dokumen SOA terdahulu sehingga dalam proses bisnis yang dilakukan tidak langsung ditemukan perubahan yang baru, akan tetapi harus melihat proses secara keseluruhan. Maka dari itu, sangat perlu dokumentasi aturan terdahulu untuk mempermudah proses implementasi SOA.

#### 4. Kesimpulan

Peningkatan transparansi dan pengaturan industri audit yang mendorong efektivitas dan independensi auditor sangat diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Implementasi SOA di PT. Telkom, terutama menyangkut *section 302 (Corporate*

*responsibility for financial reports)* dan *section 404 (Management assessment of internal controls)* diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam mewujudkan *Good, Governance Corporate (GCG)*. Dengan *Good, Governance Corporate* ini maka transparansi PT. Telkom sebagai perusahaan publik akan semakin baik dan terpercaya. Dan keefektifan hasil internal audit juga ditentukan oleh ketaatan perusahaan dalam mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Beberapa kekurangan dalam implementasi SOA di PT. Telkom, khususnya PT. Telkom Yogyakarta merupakan hal yang sangat wajar terjadi karena sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang pertama kali mengimplementasikan SOA, PT. Telkom masih harus banyak belajar dalam memahami aturan ini. Dalam pelaksanaannya, implementasi SOA di PT. Telkom masih terdapat beberapa hal yang dapat memperlambat proses implementasi SOA diantaranya ; struktur organisasi dan proses bisnis yang ada saat ini belum sesuai dengan standard keseragaman, terdapat wacana di kalangan karyawan bahwa dengan implementasi SOA membuat proses bisnis menjadi “*complicated*” tidak simple lagi, pada beberapa proses bisnis baru dirasa kurang efisien dan membuat proses menjadi lama, serta sangat minimnya dokumen SOA terdahulu sehingga dalam proses bisnis yang dilakukan tidak langsung ditemukan perubahan yang baru.

#### Saran

1. Dalam prosedur kerja di bagian verifikasi, fungsi verifikasi dokumen pertanggung jawaban belum sepenuhnya dapat mendeteksi transaksi yang salah akun, sehingga masih perlu dikoreksi kembali sebelum di-*entry* ke SAP.
2. Untuk memaksimalkan kinerja perusahaan terhadap implementasi SOA, hendaknya Staff Telkom harus menguasai *fundamental issue* dari SOA, yakni antara lain :
  - a. Proses sertifikasi *internal control* dilakukan tiap tahun.
  - b. Proses evaluasi *internal control* juga harus dilakukan setiap tahun.
  - c. Dampaknya: keterlibatan staff Telkom dalam proyek, bekerjasama melakukan dokumentasi *internal control* dengan konsultan, dan *knowledge transfer* merupakan hal yang harus dilakukan agar Telkom tetap bisa mempertahankan opini *unqualified* dari Eksternal Auditor tanpa bergantung kepada kehadiran konsultan.
3. Bagi penelitian selanjutnya perlu memasukkan faktor lain yang diperkirakan berinteraksi dengan opini atas pelaporan keuangan, seperti penyajian laporan keuangan dengan *International Financial Reporting Standar*, bukti audit yang memadai dan peran pengendalian internal

berbasis sarbanes oxley act.

#### Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu (1991), *Teknik Belajar Yang Efektif*, Jakarta : Rineke Cipta.
- Arens, Alfin. A (1990), *Auditing, Suatu Pendekatan Terpadu*, Jakarta : Erlangga. Badan Pengelola Pasar Modal (2003), "Peraturan Bapepam No. VIII.G.1" Jakarta, Desember.
- Fatmawati, Dewi (2005), *Laporan Akhir Program Cooperative Education Di bagian Keuangan PT TELKOM Yogyakarta*, FE UGM.
- Hadi, Sutrisno (1989), *Metodologi Research*, Jilid 2, Yogyakarta : Andi Offset.
- Handadari, Cahyo (2003), *THE TELKOM WAY 135*, Warta Komunika PT. Telkom Divre IV No. 04, April.
- Hartadi, Bambang (1987), *Auditing, Suatu Pedoman Pemeriksaan Akuntansi Tahap Pendahuluan*, Yogyakarta : BPF.
- Mulyadi (2002), *Auditing Edisi 6*, Cetakan 1, Jakarta : Salemba Empat. Munawir. H.S (1995), *Auditing Modern*, Yogyakarta : BPF.
- Muntoro, Ronny Kusuma (2006), *Sarbanes-Oxley Act, Mungkinkah Diterapkan di Indonesia ?*, Usahawan No. 02, Februari.
- Murdijaningsih1 Tjahjani (2014), *Sarbanes Oxley Role In The Ditections Financial Statement Fraud In Telkom To Support Good Corporate Governance*, Economics Faculty Wijayakusuma University, Purwokerto.
- Sukandar, Hendar (2005), *SOA (Sarbanes-Oxley Act)*, Warta Komunika PT. Telkom Divre IV. No. 11, Nopember.
- Sunandar, Haris (2005), *Bagaimana ISO 9001: 2000 Mendukung Respon dari Requirement SOA*, Warta Komunika PT. Telkom Divre IV. No.05, Mei.
- Sunarto (2003), *Auditing*, Cetakan 1, Yogyakarta : Pena Persada.
- Suwiknyo, Dwi (2006), *Prosedur Implementas Pengendalian Intern di Bagian Keuangan PT. Telkom Kandatel Yogyakarta*, STEI Yogyakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi S (2003), *Memahami Kinerja Keuangan Perusahaan*, Yogyakarta : Balairung & Co
- Hartadi, Bambang (1999), *Sistem Pengendalian Intern Dalam Hubungannya Dengan Manajemen dan Audit*, Cetakan 1, Yogyakarta : BPF <http://www.telkom-indonesia.com>
- Ivey, Jamie (2002), *Sarbanes-Oxley : A New Era Dawns*, Corporate Finance, ISS : 214. September.
- Jusup, Al.Haryono (2001), *Auditing*, Cetakan 1, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.
- Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : KD.25/PS 150/CTG-10/2005 Tentang Organisasi Divre IV Jateng & DIY.
- Krismiaji (2002), *Sistem Informasi Akuntansi*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Lennox Clive S. (1999), *Audit Quality and Auditor Size: An Evaluation of Reputation and Deep Mulyadi (1992), Pemeriksaan Akuntan*, Cetakan 1, Yogyakarta : STIE YKPN
- Mulyadi (2001), *Sistem Akuntansi Edisi 3*, Cetakan 3, Jakarta : Salemba Empat.